



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TA 2024

BerAKHLAK > **#** bangga
melayani
bangsa

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 900/211/BKAD/2024
100.3.7/989/DPRD-TPN/2024
TANGGAL : 31 JULI 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M. Pd**
Jabatan : Pj. Bupati Tapin
Alamat Kantor : Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **H. YAMANI, S.Ak, M.M**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

b. Nama : **H. MIDPAY SYAHBANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

c. Nama : **Hj. HERNY MUSTIKA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin
Alamat Kantor : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rantau, 31 Juli 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

Selaku,
PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M. Pd

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

Selaku,
PIHAK KEDUA



H. YAMANI, S.Ak, M.M

KETUA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to H. Midpay Syahbani.

**H. MIDPAY SYAHBANI
WAKIL KETUA**

**Hj. HERNY MUSTIKA
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... I – 1
- 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA I – 2
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA..... I – 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II – 1
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II – 27

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN..... III – 1
- 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD..... III – 21

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Di Proyeksikan..... IV – 1
- 4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah IV – 1

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja . V – 1
- 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer V – 1

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan..... VI – 1
- 6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan..... VI – 1

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian..... VII - 1

BAB VIII PENUTUP

Penutup VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	II – 5
Tabel 2.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	II – 7
Tabel 2.3.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	II – 10
Tabel 2.4.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	II – 14
Tabel 2.5.	Laju Inflasi Kabupaten Bulan Mei Tapin 2024	II – 18
Tabel 2.6.	Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2023.....	II – 18
Tabel 2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II – 22
Tabel 2.8.	Garis Kemiskinan Penduduk Kabupten Tapin Tahun 2018 - 2023	II – 25
Tabel 2.9.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	II – 27
Tabel 2.10.	Kebijakan Keuangan Daerah.....	II – 29
Tabel 3.1	PDB Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	III – 4
Tabel 3.2	Perkembangan Inflasi Bulan Maret 2024	III – 6
Tabel 3.3	Perkembangan Inflasi Bulan April 2024.....	III – 8
Tabel 3.4	Perkembangan Inflasi Bulan Mei 2024.....	III – 9
Tabel 3.5	Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2024.....	III – 21
Tabel 3.6	Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBD Tahun 2024.....	III – 22
Tabel 4.1.	Perbandingan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin TA 2024	IV – 3
Tabel 5.1.	Perbandingan Belanja Daerah Kabupaten Tapin TA 2024.....	V – 2
Tabel 6.1.	Perbandingan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin TA 2024	VI – 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2023 (persen).....	II – 8
Gambar 2.2.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin 2019-2023.....	II – 12
Gambar 2.3.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.....	II – 15
Gambar 2.4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.....	II – 23
Gambar 2.5.	Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.....	II – 25
Gambar 2.6.	Indkes Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.....	II – 26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) Tahun 2024 disusun untuk memenuhi amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah Menyusun KUPA sebagai pedoman dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode.

Perubahan APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasar pada ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 BAB VI huruf B poin 2 sebagaimana mengacu pada pasal 161 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan anggaran berjalan ;



- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2024 dan optimalisasi pencapaian target program pembangunan, saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

Berkenaan kondisi tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disertai optimisme perbaikan ekonomi didukung oleh program-program baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hal tersebut maka APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 perlu melakukan perubahan. Perubahan itu sendiri tidak mesti harus melakukan penambahan anggaran, tapi bisa berupa pergeseran anggaran. Adapun perlunya dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Tapin meliputi:

1. Perubahan asumsi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
2. Perubahan proyeksi pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Penyesuaian target kinerja yang akan dicapai dikarenakan adanya penambahan atau pengurangan serta pergeseran Anggaran Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah:



- a. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
- c. Terlaksananya kegiatan pembangunan secara terarah, efisien dan efektif.
- d. Tercapainya sasaran pembangunan daerah.
- e. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tapin diharapkan mampu mempercepat program-program pembangunan yang telah digulirkan ke Masyarakat baik program dari Kabupaten Tapin itu sendiri, maupun program-program yang didukung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan sehingga berkembangnya sektor riil sehingga menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Tapin dalam RPD Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada arah pembangunan tahun pertama maka tema pembangunan Kabupaten Tapin pada tahun 2024 adalah :“**Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Masyarakat**”

Prioritas pembangunan Kabupaten Tapin haruslah selaras dengan prioritas Nasional dan sejalan dengan prioritas Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut dapat dilihat keterkaitan dan keselarasan antara prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024.



Prioritas Kabupaten Tapin Tahun 2024 terdiri dari empat belas prioritas yang di adopsi dari arah kebijakan pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pendidikan di Kecamatan Tapin Selatan berbasis IT;
2. Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan;
3. Optimalisasi diversifikasi pertanian;
4. Pengembangan perkebunan kerakyatan;
5. Peningkatan iklim investasi daerah;
6. Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Tanaman Pangan;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan;
8. Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup;
9. Peningkatan pendapatan petani/buruh pertanian pada sektor unggulan daerah;
10. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
11. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah;
12. Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan;
13. Pembentukan Perusahaan Daerah Tapin;
14. Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada



Adapun Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah “ **Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**” dengan lima prioritasnya yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan sektor industry, UMKN, pertanian dan pariwisata;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

Tahun 2024 pemerintah pusat telah menggulirkan tujuh prioritas pembangunan dengan tema “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan uraian prioritas sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dari Tahun 2019 – 2023 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, perekonomian di Indonesia mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, demikian pula berdampak terhadap perekonomian di Kabupaten Tapin yang mengalami pertumbuhan negatif. Seiring berjalannya waktu, aktivitas ekonomi semakin membaik dikarenakan pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Laju pertumbuhan ekonomi pun mulai kembali menuju ke arah positif setelah pernah terpuruk di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Meredanya pandemi ini turut memberikan efek positif terhadap aktivitas sektor-sektor ekonomi yang mulai bangkit sejak tahun 2021. Berbagai Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali perekonomian. Pemerintah terus berperan aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini memberikan pengaruh positif di mana hampir semua lapangan usaha menunjukkan arah positif di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.(sumber BPS Kab Tapin 2023).



Pada Tahun 2019 PDRB ADHB 8,438 triliun dan PDRB ADHK 6,454 triliun kemudian memasuki pandemi covid pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Tapin sebesar 8,393 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 6,358 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 meningkat PDRB ADHB menjadi sebesar 9,047 triliun dan PDRB ADHK sebesar 6,575 triliun. Tahun 2022 terjadi lagi peningkatan PDRB ADHB menjadi sebesar 12,770 triliun dan PDRB ADHK menjadi sebesar 6,898 triliun rupiah. Tahun 2023 PDRB ADHB mengalami kenaikan menjadi 13.694 triliun dan PDRB ADHK menjadi sebesar 7,235 triliun.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No	Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
		Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2019	8.438.249	5,49	6.454.990	4,24
2	2020	8.393.891	- 0,53	6.358.489	- 1,49
3	2021	9.387.409	11,84	6.576.273	3,43
4	2022*	12.771.255	36,05	6.898.883	4,91
5	2023**	13.694.176	7,23	7.235.231	4,88

Ket : * = angka sementara ; ** = angka sangat sementara (sumber bps kab tapin)

Pada Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebesar 4,88 %. Pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan pada sektor pertambangan dan pertanian. Akan tetapi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding dengan tahun 2022 sebesar 4,91% atau mengalami penurunan sebesar 0,03 %. Hal tersebut dikarenakan adanya perlambatan pada pertumbuhan batubara yang mengalami tren penurunan harga



Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dihitung dengan melihat konsumsi dan harga yang digunakan saat tahun yang bersangkutan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019 - 2023, PDRB ADHB Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terkecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Tapin bernilai 8,39 triliun rupiah, nominalnya turun dibanding tahun 2019 yang bernilai 8,43 triliun rupiah. Penurunan PDRB ADHB dipengaruhi oleh penurunan produksi dari barang dan jasa terkait pandemi COVID-19. Setelah tahun 2021 PDRB ADHB terus meningkat dari 9,387 triliun menjadi 13,694 triliun pada tahun 2023.

Pola kontribusi PDRB ADHB cenderung sama di setiap tahunnya. Kontribusi konsumsi rumah tangga memberikan peranan terbesar, lebih dari 40 persen di setiap tahunnya. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari pengeluaran untuk modal (PMTB) yang berada di kisaran 20 persen-an tiap tahunnya

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin fluktuatif cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) Periode 2019-2023. PDRB ADHK memiliki pola pergerakan nominal yang sejalan dengan PDRB ADHB.

PDRB ADHK dapat melihat bagaimana pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Nilai pertumbuhan ekonomi inilah yang dapat menggambarkan hasil dari kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama tahun 2019-2023 secara rata-rata mencapai 3,19 persen.

Pada tahun 2019 PDRB ADHK dengan nilai 6,454 triliun pertumbuhan ekonomi 4,24%, kemudian menurun tajam di tahun 2020 pada masa pandemi covid 19 dengan angka pertumbuhan -1,49 % atau pada PDRB ADHK sebesar 6,358 triliun. Pada tahun 2021 PDRB ADHK perlahan mulai naik 6,576 triliun dengan persentase pertumbuhan 3,43 %. Tahun 2022 pertumbuhan mencapai 4,91 % dengan PDRB ADHK sebesar 6,898 triliun, kemudian tahun 2023 PDRB ADHK 7,235 triliun dengan angka pertumbuhan sebesar 4,88 % sedikit mengalami perlambatan dibanding dengan tahun sebelumnya.



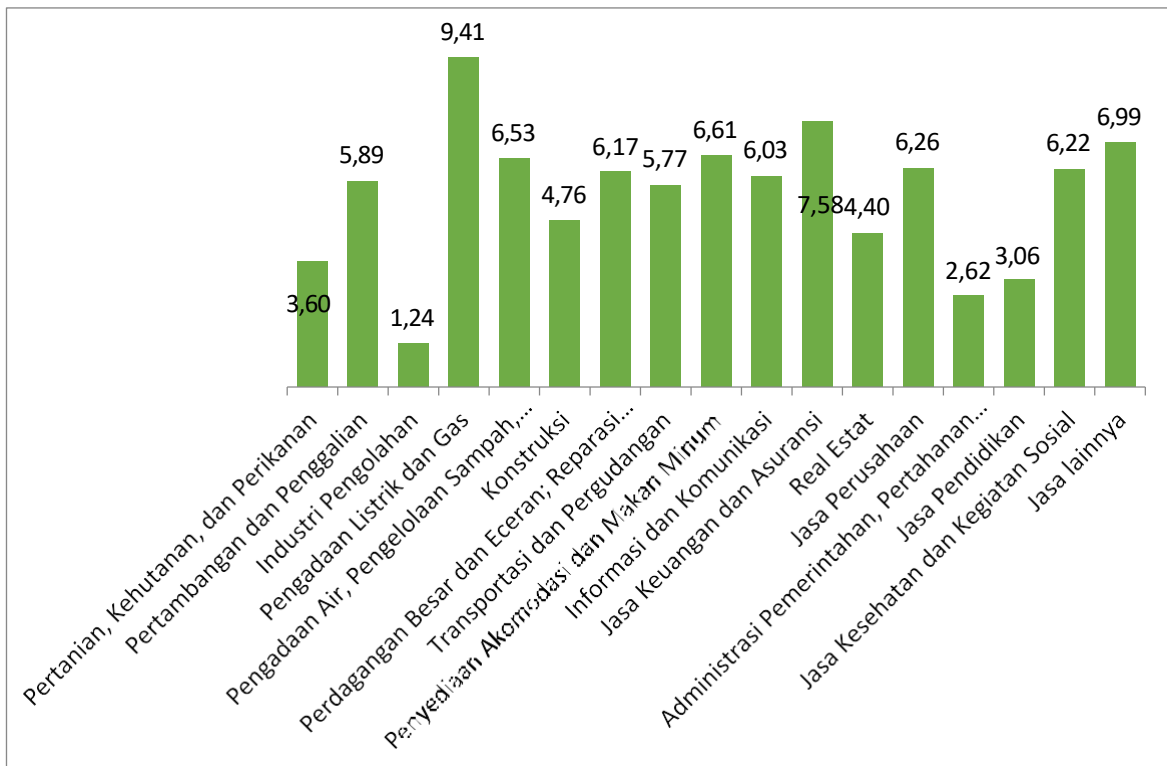
Beberapa sektor di Kabupaten Tapin relatif stabil dan ada beberapa sektor cukup fluktuatif. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sektoral.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	5.36	-4.34	-1.57	-0.36	3,60
B Pertambangan dan Penggalian	3.00	-2.04	5.82	7.84	5,89
C Industri Pengolahan	4.29	-4.29	4.37	2.69	1,24
D Pengadaan Listrik dan Gas	4.14	4.38	4.27	7.40	9,41
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.15	-0.33	3.48	4.03	6,53
F Konstruksi	4.73	-0.68	2.40	4.56	4,76
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.38	-0.23	1.27	7.55	6,17
H Transportasi dan Pergudangan	4.89	-1.60	4.68	6.62	5,77
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.93	-0.87	5.62	6.49	6,61
J Informasi dan Komunikasi	4.52	7.42	7.32	5.31	6,03
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6.05	5.85	-1.34	-1.60	7,58
L Real Estate	3.68	2.97	3.09	5.71	4,40
M,N Jasa Perusahaan	4.81	-2.64	5.54	6.19	6,26
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.81	0.96	3.39	2.23	2,62
P Jasa Pendidikan	3.98	-0.38	4.59	4.62	3,06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.66	2.11	9.13	3.65	6,22
R,S,T,U Jasa lainnya	1.64	-0.68	1.30	5.22	6,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,24	-1,49	3,43	4,91	4,88

Keterangan: *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara
Sumber: Kabupaten dalam angka tahun 2024

Gambar 2.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2023 (persen)



Pada tabel tersebut dapat dilihat pertumbuhan masing-masing sektor rata-rata mengalami peningkatan. Sektor yang mengalami kenaikan paling tinggi terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada sektor ini mengalami peningkatan sebesar 9,18 persen, dari -1,60 persen pada tahun 2022 menjadi 7,58 persen pada tahun 2023. Kemudian sektor kedua yang mengalami kenaikan terdapat pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Pada sektor ini terjadi peningkatan sebesar 3,96 persen dari 0,36 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 3,60 persen pada tahun 2023. Kemudian disusul oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan angka pertumbuhan sebesar 6,22 persen. Terjadi peningkatan sebesar 2,57 persen dari 3,65 persen pada tahun 2022 menjadi 6,22 persen pada tahun 2023. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menduduki posisi ke empat, dari 4,03 persen pada tahun 2022 menjadi 6,53 persen pada tahun 2023 atau kenaikan sebesar 2,50 persen. Sektor lainnya yang mengalami kenaikan adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Pada sektor ini terjadi kenaikan sebesar 2,01 persen, dari 7,40 persen pada tahun 2022 menjadi 9,41 persen pada tahun 2023. Kemudian disusul oleh sektor jasa lainnya



mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen dari 5,22 persen menjadi 6,99 persen pada tahun 2022. Sektor yang mengalami kenaikan yang tidak signifikan adalah sektor informasi dan komunikasi dengan kenaikan sebesar 0,72 persen dari 5,31 persen pada tahun 2022 menjadi 6,03 persen pada tahun 2023. Kemudian sektor konstruksi dengan kenaikan sebesar 0,20 persen dari 4,56 persen pada tahun 2022 menjadi 4,76 persen pada tahun 2023. Sektor terakhir dengan kenaikan sedikit adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kenaikan sebesar 0,12 persen dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 6,61 persen pada tahun 2023.

Selain sektor yang mengalami kenaikan, terdapat juga beberapa sektor yang mengalami penurunan. Adapun sektor yang mengalami penurunan antara lain yaitu sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan 1,95 persen dari 7,84 persen menjadi 5,89 persen. Sektor industri pengolahan terjadi penurunan sebesar 1,45 persen dari 2,69 persen pada tahun 2022 menjadi 1,24 pada tahun 2023. Pada sektor pendidikan terjadi penurunan sebesar 1,56 persen dari 4,62 persen pada tahun 2022 menjadi 3,06 persen pada tahun 2023. Selanjutnya sektor perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor terjadi penurunan sebesar 1,38 persen dari 7,55 persen menjadi 6,17 persen. Terjadi penurunan sebesar 1,31 persen pada sektor real estate dari 5,71 persen pada tahun 2022 menjadi 4,40 persen pada tahun 2023. Pada sektor transportasi dan pergudangan terjadi sedikit penurunan 0,85 persen dari 6,62 persen pada tahun 2022 menjadi 5,77 persen pada tahun 2023.

Dilihat dari distribusi PDRB tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor primer mendominasi perekonomian yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha yang merupakan kontributor terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Tapin tahun 2023 adalah pertambangan dan penggalian yang mencapai angka 44,50 persen dengan komoditi utamanya adalah batubara. Besarnya distribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ini disebabkan karena adanya wilayah produsen komoditas pertambangan batu bara di Kabupaten Tapin.



Selama kurun lima tahun terakhir, sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Tapin karena menyumbang PDRB paling besar.

2.1.2 Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PDRB

Peranan ekonomi sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat penting dalam menganalisis struktur dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Setiap sektor ekonomi memberikan kontribusi yang berbeda terhadap PDRB, dan peranan ini bisa berubah seiring waktu berdasarkan berbagai faktor, seperti kebijakan ekonomi, investasi, dan perubahan teknologi.

Struktur ekonomi dapat membantu pembuat kebijakan/perencana untuk mengetahui sektor yang dominan atau yang dapat diandalkan dan menjadi ciri khas perekonomian regional, sehingga rencana pembangunan ekonomi yang dilakukan tepat sasaran.

Dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 – 2023 sektor usaha pertambangan dan penggalian tetap menjadi unggulan sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Tapin. Enam dari dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Binuang, Hatungun, Tapin Selatan, Salam Babaris, Bungur dan Lokpaikat adalah penghasil Batu Bara. Berikut perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Tapin periode 2019 – 2023.

Tabel 2.3
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	21.06	20.45	18.93	13.89	14,26
B Pertambangan dan Penggalian	27.19	26.64	28.45	45.41	44,50
C Industri Pengolahan	6.8	6.65	6.82	5.13	4,71
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0.11	0.11	0.08	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.32	0.31	0.26	0,26
F Konstruksi	5.83	5.85	5.85	4.57	4,65



G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.58	10.80	10.63	8.70	9,23
H Transportasi dan Pergudangan	3.31	3.32	3.26	2.67	2,98
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.38	2.44	2.46	1.90	1,94
J Informasi dan Komunikasi	3.7	3.98	3.98	3.06	3,07
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.23	1.30	1.27	0.93	0,96
L Real Estate	1.42	1.51	1.49	1.13	1,13
M,N Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.09	0,10
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.84	8.08	7.84	5.80	5,77
P Jasa Pendidikan	5.28	5.44	5.42	4.06	3,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.88	1.99	2.10	1.58	1,62
R,S,T,U Jasa lainnya	0.96	0.99	0.95	0.73	0,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

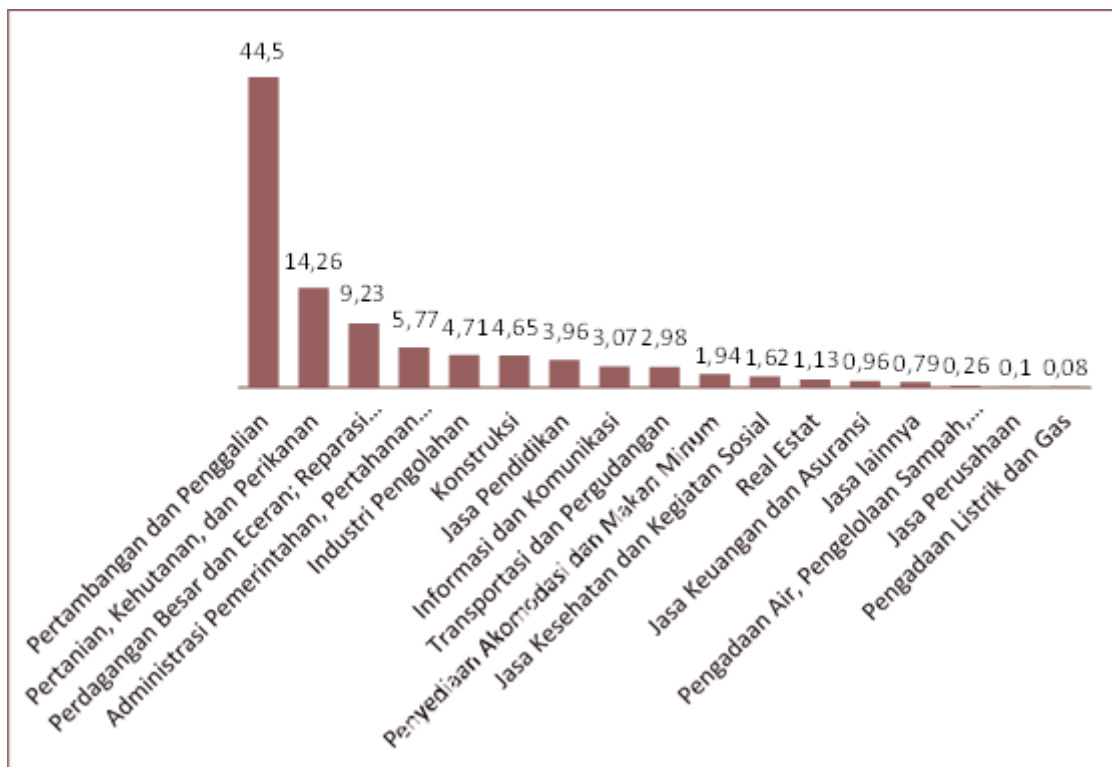
Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2024

Sektor Pertambangan dan Penggalan masih dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 44,50%. Pada urutan kedua sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Tapin adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 14,26% % kemudian untuk sektor yang ketiga yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 9,23 %. Pada sektor ke empat ditempati sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB sebesar 5,77%. Pada posisi ke lima sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 4,71%.

Walaupun sektor pertambangan mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin, akan tetapi secara global peningkatan yang cukup tinggi terdapat pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kenaikan terjadi sebesar 0,53% dari tahun 2022 sebesar 8,70% menjadi 9,23% pada tahun 2023. Sektor kedua yang mengalami kenaikan adalah terdapat pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,37% dari 13,89% menjadi 14,26%. Sektor Transportasi dan Pergudangan menempati urutan

ketiga yaitu peningkatan sebesar 0,31% dari 2,67% pada tahun 2022 menjadi 2,98% pada tahun 2023.

Beberapa sektor lain terjadi penurunan, yaitu sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan sebesar 0,42% dari 5,13% pada tahun 2022 menjadi 4,71% pada tahun 2023. Sektor kedua yang mengalami penurunan adalah sektor pendidikan 0,1% dari 4,06% pada tahun 2022 menjadi 3,96% pada tahun 2023. Sedangkan sektor ketiga yang mengalami penurunan adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terjadi penurunan sebesar 0,03% dari 5,80% pada tahun 2022 menjadi 5,77% pada tahun 2023.



Gambar 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor tersebut. Demikian halnya untuk mengetahui lebih jauh tentang komposisi perekonomian



daerah, perlu dilihat besarnya peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB ADHB.

Struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah secara singkat, terlebih pada beberapa wilayah yang sudah mapan. Perubahan struktur ekonomi hanya terjadi apabila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi.

Struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah secara singkat, terlebih pada beberapa wilayah yang sudah mapan. Perubahan struktur ekonomi hanya terjadi apabila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi.

2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah ukuran ekonomi yang mengindikasikan rata-rata pendapatan atau output ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan ekonomi.

PDRB per kapita memungkinkan perbandingan ekonomi antar daerah. Ini membantu dalam memahami daerah mana yang lebih maju atau tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. Disamping itu juga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, baik dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

PDRB per kapita adalah nilai dari pembagian antara nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada periode tertentu. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung karena hasil penghitungan PDRB per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selama kurun tahun 2019-2023 PDRB perkapita ADHB Kabupaten



Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp.44.547.827 pada tahun 2019 menjadi Rp.69.701.818 pada tahun 2023.

Dari sisi PDRB perkapita ADHK, selama kurun tahun 2019-2023 PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp.34.077.658 pada tahun 2019 menjadi Rp. 36.826.516 pada tahun 2023.

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2023

No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB Perkapita ADHK	
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
1	2019	44.547.827	3.712.318	34.077.658	2.839.804
2	2020	44.424.582	3.702.048	33.652.240	2.804.353
3	2021	49.018.624	4.084.885	34.339.600	2.861.633
4	2022*	65.825.783	5.485.482	35.558.321	2.963.193
5	2023**	69.701.818	5.808.485	36.826.516	3.068.876

Keterangan : *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara
Sumber : <https://tapinkab.bps.go.id> (diolah) tahun 2024

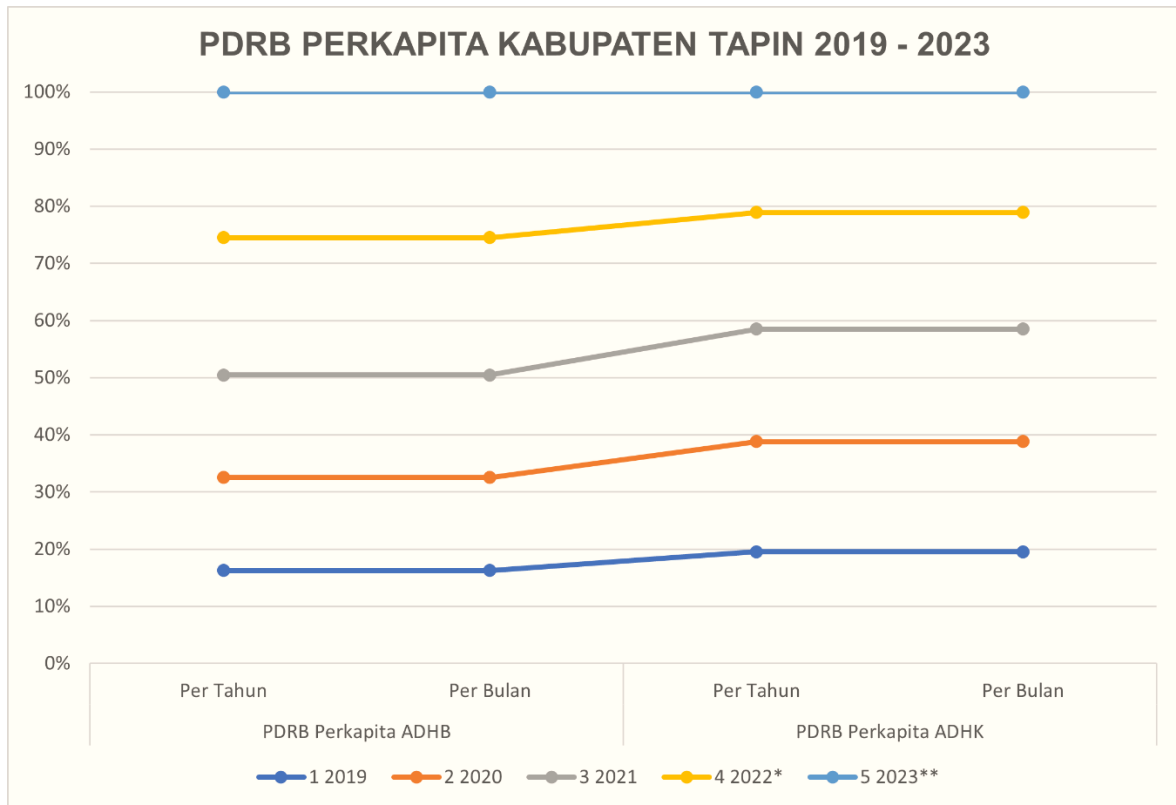
Nilai PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Tapin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,89 persen . Keadaan ini diperlihatkan dari nilai PDRB per kapita tahun 2023 yang besarnya mencapai 69,70 juta rupiah, sementara pada tahun 2022 masih berada di nilai 65,83 juta rupiah. Dalam periode 5 tahun (2019-2023) terakhir rata-rata tumbuh positif kecuali tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -0,28 persen. Pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2022 sebesar 34,06 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara pertumbuhan melambat dari tahun 2023 yang mencapai angka 5,89 persen dibandingkan tahun 2022.

Nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kabupaten Tapin tahun 2019-2023 juga memiliki pola yang sama dengan PDRB per kapita ADHB . Nilai PDRB per kapita ADHK tahun 2023 adalah 36,83 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK per kapita naik pada tahun 2023 sebesar 3,57



persen dibandingkan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan 3,55 persen.

Gambar 2.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



2.1.4 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerangka ekonomi makro suatu daerah. Inflasi, yang merupakan peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa, memengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk daya beli masyarakat, tingkat investasi, stabilitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Beberapa pengaruh utama tingkat inflasi terhadap kerangka ekonomi makro daerah adalah dengan Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat. Ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.



Dampak inflasi memberikan efek negatif karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Oleh karena itu Pemerintah selalu menjaga inflasi agar terkendali guna menjaga kestabilan ekonomi dalam pembangunan.

Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Ini dapat mengganggu fungsi pasar, menurunkan kepercayaan bisnis, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mungkin harus menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi. Ini termasuk peningkatan suku bunga, pengurangan pengeluaran pemerintah, atau peningkatan pajak.

Tingkat inflasi memiliki implikasi yang luas bagi ekonomi makro daerah. Pengendalian inflasi yang efektif merupakan tantangan penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan tingkat inflasi Kabupaten Tapin mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin.

Inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2024 di Kota Banjarmasin sebesar 2,58 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,69 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,75 persen; kelompok transportasi sebesar 0,76 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,54 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,80 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,13 persen. Sementara kelompok



pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,92 persen.

Perkembangan inflasi bulan April 2024 di Kota Banjarmasin sebesar 3,03 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,96 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,61 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,94 persen; kelompok transportasi sebesar 5,57 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,06 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,24 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,62 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen. Sedangkan inflasi month to month dan year to date masing-masing sebesar 0,56 dan 1,87 persen.

Tingkat inflasi di Kota Banjarmasin Bulan Mei 2024 sebesar 2,99 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,48 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 6,76 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,06 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,65 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,41 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Sedangkan inflasi month to month dan Tingkat inflasi year to date sebesar 0,13 dan 2,00 persen.



Berdasar acuan inflasi di kota Banjarmasin maka laju inflasi bulan Mei 2024 di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei Tahun 2024

No	INDIKATOR	Inflasi Mei 2024	Inflasi Tahun Kalender 2024	Inflasi Tahun ke Tahun
		(1)	(2)	(3)
1	Laju Inflasi (%)	0,13	2,00	2,99

1) Persentase perubahan IHK MEI 2024 terhadap IHK bulan APRIL 2024

2) Persentase perubahan IHK MEI 2024 terhadap IHK Desember 2023

3) Persentase perubahan IHK MEI 2024 terhadap IHK MEI 2023

Sumber : BPS Banjarmasin 2024 bulan Juni

Perkembangan tingkat inflasi/deflasi Kota Banjarmasin sangat fluktuatif pada 3 tahun terakhir. Tahun 2021 inflasi sebesar 2,54 persen, kemudian mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,98 persen, dan inflasi kembali menurun pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,28 persen. Berikut perkembangan inflasi di Kota Banjarmasin periode tahun 2021 – 2023.

Tabel 2.6
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2023

Komoditas inflasi	2021	2022	2023
Umum	2,54	6,98	2,28
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	4,42	8,96	3,14
2. Pakaian dan Alas Kaki	3,43	7,67	2,44
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,69	3,28	0,74
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,87	5,31	2,98
5. Kesehatan	0,19	1,35	0,61
6. Transportasi	-0,85	17,50	1,49



Komoditas inflasi	2021	2022	2023
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,59	-0,50	-0,47
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,97	11,34	4,35
9. Pendidikan	2,10	5,26	5,15
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,41	1,97	1,05
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,95	9,65	6,13

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2021-2023 tingkat inflasi tahun kalender

Inflasi di Kota Banjarmasin pada bulan Desember 2021 terjadi karena kenaikan indeks harga pada pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,20 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,63 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,52 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,22 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,19 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,95 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,38 persen; dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,11 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,22. Untuk kelompok pengeluaran Pendidikan pada bulan November 2021 tidak mengalami perubahan indeks harga.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2021, antara lain: angkutan udara, pepaya, cabai rawit, minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain: ikan gabus, ikan peda, daging ayam ras, mangga, dan popok bayi sekali pakai/diapers.

Inflasi di Kota Banjarmasin pada bulan Desember 2022 terjadi karena kenaikan indeks harga pada pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,95 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga sebesar



0,03 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,31 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,81 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,88 persen. Sedangkan terjadi penurunan indeks harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,09 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,56 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Kelompok Pendidikan dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks harga.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain beras, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan gabus, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, pengharum cucian/pelembut, dan minyak goreng.

Bulan Desember 2023, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,12 persen. Laju inflasi kalender tahun 2022 (Desember 2023 terhadap Desember 2022) yaitu sebesar 2,28 persen dan laju inflasi "year on year" adalah 2,28 persen. Inflasi bulan Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang pada lima dari sebelas kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Harga Konsumen pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,97 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,27 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,26 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar 0,04 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,40 persen.

2.1.5 Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan adalah dua indikator ekonomi yang saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap kerangka ekonomi makro suatu daerah. Kedua masalah ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, stabilitas sosial, dan kebijakan pemerintah..

Tingginya tingkat pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Ini



berdampak negatif pada permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran yang tinggi berarti banyak sumber daya manusia yang tidak digunakan secara optimal, yang menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk bantuan sosial dan program pengentasan pengangguran, seperti pelatihan kerja dan subsidi pengangguran, disamping itu dapat meningkatnya masalah sosial, seperti kriminalitas, ketidakstabilan politik, dan ketidakpuasan masyarakat.

Masyarakat yang menghadapi pengangguran berkepanjangan mungkin kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi ekonomi, yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator alat untuk mengukur pengangguran. angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan tingkat kegagalan penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Kabupaten Tapin mempunyai nilai TPT sebesar 3,93 persen, artinya dari 100 orang Angkatan kerja di Kabupaten Tapin terdapat sekitar 3-4 orang pengangguran. angka pengangguran dari tahun 2020 mengalami peningkatan di 2021 yang disebabkan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan dan pembatasan kegiatan oleh pemerintah sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Namun, nilai TPT Kabupaten Tapin pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semula pada tahun 2022 sebesar 4,15 persen turun sebesar 0,22 di tahun 2023. Artinya tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin Tahun 2023 telah menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,79	3,73	4,96	4,15	3,93

Kemiskinan merupakan situasi ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, kemiskinan dapat terjadi akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat tersebut dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya.

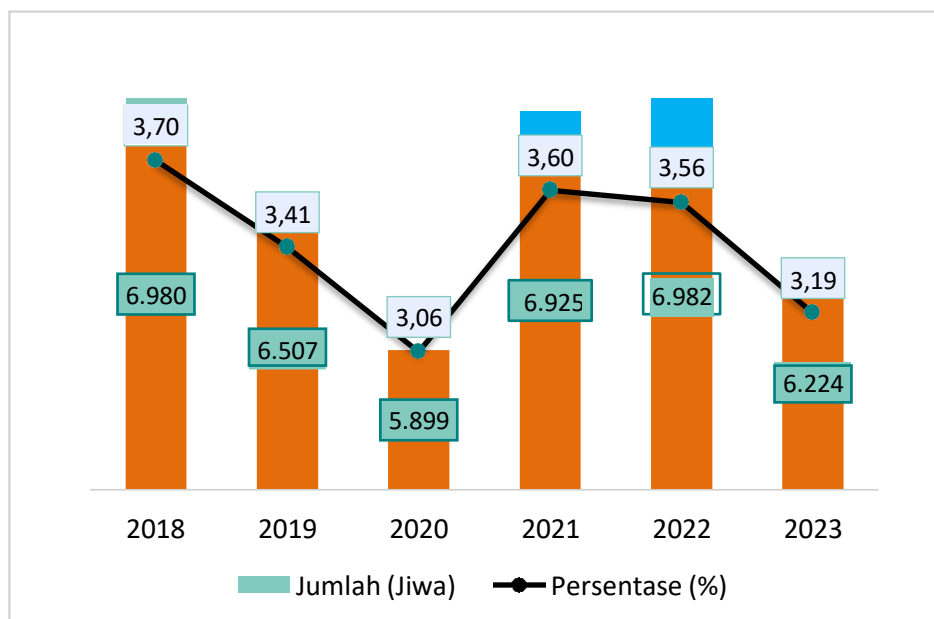
Apabila dalam suatu daerah tingkat kemiskinannya tinggi, maka sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan memiliki akses yang terbatas terhadap kemajuan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sehingga menghambat dalam proses pembangunan dan sulit untuk ditingkatkan. Selain itu Kemiskinan juga dapat membatasi kemampuan individu atau masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang terus berkembang.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun di Kabupaten Tapin menunjukkan kecenderungan menurun., pada tahun 2018 hingga 2020, Jumlah penduduk miskin berada di angka antara 5.000 hingga 7.000-an jiwa dan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk berada di angka 3 (tiga) persen-an. Nilai tertinggi terdapat pada tahun 2018, dimana jumlah penduduk miskin mencapai 6.980 jiwa atau sekitar 3,70 persen dari jumlah penduduk.

Akan tetapi mulai tahun 2021 terjadi peningkatan penduduk miskin dari 5.899 jiwa di tahun 2020 menjadi 6.925 jiwa. Hingga pada tahun 2022 mencapai 6.982 jiwa. Meskipun secara persentase angka ini mengalami penurunan, dari 3,60 persen di tahun 2021 menjadi 3,56 persen di tahun 2022. Penyebabnya

kemungkinan disebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang sedang diterpa pandemi COVID-19, dimana di masa pandemi terjadi banyak kendala dalam berusaha karena batasan-batasan, baik batasan protokol kesehatan dari pemerintah atau karena masyarakat membatasi diri sendiri untuk berusaha mendapatkan penghasilan akibat takut terkena penyakit COVID-19. Keadaan mulai membaik di tahun 2023, jumlah penduduk miskin maupun persentasenya di Kabupaten Tapin mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu jumlah penduduk miskin sekitar 6.224 jiwa dengan persentasenya 3,19 persen. Pada gambar berikut grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin, 2018-2023.

Gambar 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023



Sumber: Susenas

Kemiskinan memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap ekonomi makro suatu daerah. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, distribusi pendapatan, dan kebijakan pemerintah. Kemiskinan mengurangi akses individu terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini dapat



mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja.

Kondisi kesehatan yang buruk akibat kemiskinan dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan biaya kesehatan bagi masyarakat dan pemerintah. Tingginya tingkat kemiskinan mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk mengatasi kemiskinan dan dampaknya terhadap ekonomi makro, pemerintah daerah dapat menerapkan berbagai kebijakan.

Pemerintah telah menggulirkan berbagai program dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai salah satu mendukung dan menjalankan dari tujuan ke satu SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Tanpa Kemiskinan. Pemerintah menginginkan tidak ada lagi kemiskinan dalam bentuk apapun dimanapun tempatnya.

Mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

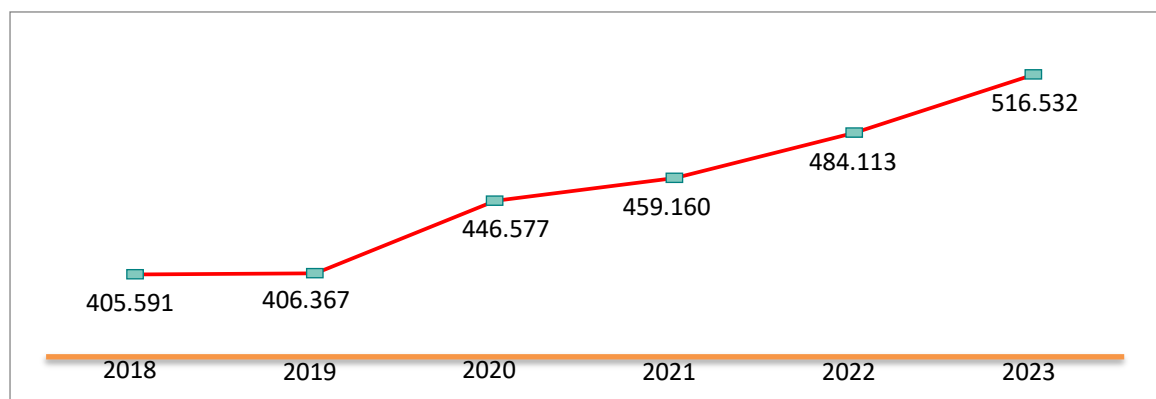
Garis Kemiskinan (GK) sendiri merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil



Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Garis kemiskinan ini digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten

Gambar 2.5 Garis Kemiskinan di Kabupaten Tapin



Tapin cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 garis kemiskinan sebesar Rp.405.951 kemudian terus meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp.516.532. Berikut gambar garis kemiskinan Kabupaten Tapin periode 2018-2023

Tabel 2.8 : Garis Kemiskinan Penduduk Kabupten Tapin Tahun 2018-2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number Of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	405 591	6 980	3,70
2019	406 367	6 507	3,41
2020	446 577	5 899	3,06
2021	459 160	6 925	3,60
2022	484 113	6 982	3,60
2023	516 532	6 224	3,19

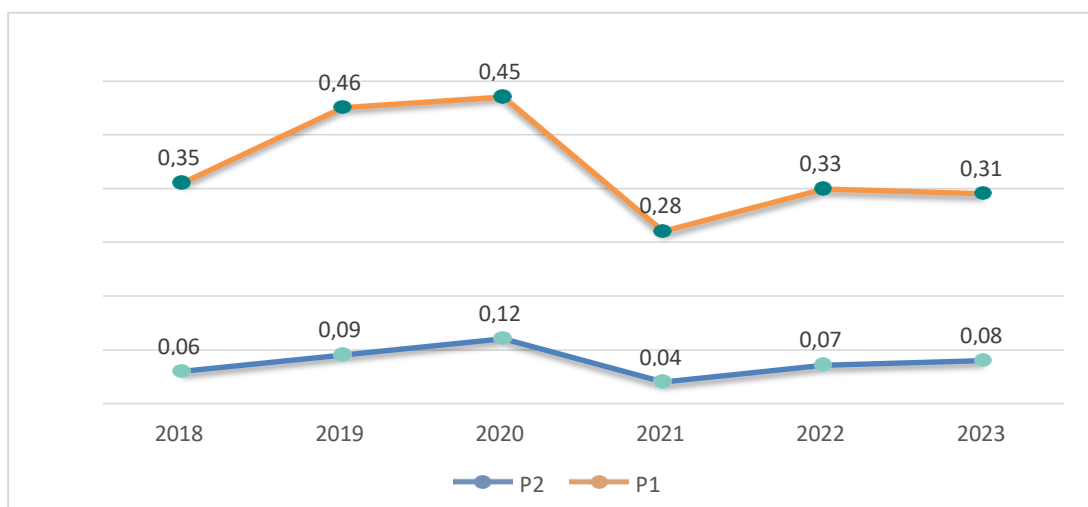


Sumber: Tabel Statistik Website BPS Kabupaten Tapin

Indikator pengukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kabupaten Tapin memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 0,35 kemudian meningkat hingga tahun 2020 yaitu sebesar 0,45. Kemudian menurun tajam pada tahun 2021 sebesar 0,28 hingga pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,31, akan tetapi indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,33.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Tingkat keparahan memiliki pola kecenderungan yang sama dengan tingkat kedalaman, keduanya sama-sama bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2023, tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Tapin bernilai 0,08. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut grafik indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023. (sumber BPS Kabupaten Tapin)

Gambar 2.6 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023



Sumber: Tabel Statistik Website BPS Kalimantan Selatan



Tabel 2.9 : Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Indeks	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2018	0.35	0.06
2019	0.46	0.09
2020	0,45	0,12
2021	0,28	0,04
2022	0,33	0,07
2023	0,31	0,08

Mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengurangi tingkat pengangguran . Pengurangan pengangguran dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja kepada warga lokal dalam berbagai bidang usaha serta menciptakan tenaga kerja mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, serta berdaya saing tinggi pada pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas



dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Di bawah ini data perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.



Tabel 2.10
Kebijakan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Belanja Daerah (Rp)
2019	1.082.883.454.188,00	1.081.725.054.188,00
2020	1.379.911.900.738,00	1.376.661.900.738,00
2021	1.302.922.624.512,00	1.777.416.499.244,27
2022	1.727.486.281.039,00	1.885.015.350.950,00
2023	1.755.183.161.896,00	1.658.525.596.396,00

Sumber: KUA dan PPAS series 2019-2023

Tahun	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
2024	Pendapatan Daerah	2.139.375.625.965	2.812.441.129.929
2024	Belanja Daerah	2.630.464.977.896	2.738.275.025.572



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin antara lain sebagai berikut:

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,1% pada 2024 hingga 2026, angka ini dapat terhambat akibat penurunan harga komoditas, peningkatan harga pangan dan energi, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Kinerja perekonomian Indonesia yang sukses sebagian besar berkat kerangka kebijakan makroekonomi pemerintah yang kuat, yang membantu menarik investasi. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertahankan kebijakan makro yang bijaksana, kredibel, dan transparan. Sekaligus menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan pembelanjaan prioritas pada perlindungan sosial dan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y-on-Y) tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis. Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan per kuartal (q-to-q). Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 berkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y).

Prediksi pertumbuhan ekonomi ini memiliki tiga skenario, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pertama, skenario pertumbuhan ekonomi terendah memiliki rentang 5,3% hingga 5,5%. Secara rinci prediksi skenario pertama pada 2020 sebesar 5,3%, 2021 sebesar 5,4%, 2022 sebesar 5,4%, 2023 sebesar 5,5%, dan 2024 sebesar 5,5%. Skenario selanjutnya masuk ke dalam skenario sedang yang memiliki rentang 5,4% hingga 6,1%. Adapun pada skenario kedua memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar 5,4%, 2021 sebesar 5,5%, 2022 sebesar 5,7%, 2023 sebesar 5,9%, dan 2024 sebesar 6,4%.

Pemerintah sangat optimis angka pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, Anis juga menjelaskan tren pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan.

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8% nilai tukar rupiah Rp.15.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7% harga minyak mentah Indonesia USD82 per barel, lifting minyak bumi 635 rpbh, dan lifting gas 1.033 juta barel setara minyak per hari.

Disisi APBN dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2.802,3 T, yang bersumber pada Perpajakan sebesar Rp2.309,9 T, PNBPNP Rp492,0 T dan Hibah sebesar 0,4 T.

Sementara itu, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB atau secara nominal sebesar Rp 522,8 triliun. Pembiayaan utang akan dikelola secara *prudent* dan dalam batas risiko yang aman.

Pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 176,2 triliun dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik untuk mampu menjalankan bisnis dan layanan secara efisien dan produktif.

Pemerintah akan senantiasa berkomitmen menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024 sehingga tetap efektif sebagai instrumen kebijakan dan pembangunan.

Perekonomian Indonesia pun mengalami dampak signifikan karena penerapan berbagai langkah penanganan pandemi, antara lain pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas. Namun, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program stimulus fiskal, kebijakan moneter, serta perlindungan sosial. Di tengah-tengah guncangan perekonomian global, pemerintah bersama DPR dan masyarakat berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid dan konsisten melaksanakan agenda reformasi struktural.

Perekonomian Indonesia juga mampu pulih lebih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7 persen, dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022, tumbuh 5,3 persen. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19 dengan cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. PDB riil Indonesia tahun 2022 telah mencapai 7,0 persen di atas level periode prapandemi.



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

TABEL 3.1
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024	Triw I-2023	Triw IV-2023	Triw I-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	597,6	603,8	613,8	339,1	327,1	327,1
B. Pertambangan dan Penggalian	600,9	510,0	493,9	214,3	240,4	234,2
C. Industri Pengolahan	941,6	1.011,9	1.019,6	613,3	640,8	638,6
D. Pengadaan Listrik dan Gas	52,7	56,8	55,3	31,0	33,5	32,6
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,2	3,4	3,5	2,6	2,7	2,7
F. Konstruksi	501,2	556,1	541,2	285,5	315,3	307,2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	657,1	687,0	695,4	389,6	407,0	407,5
H. Transportasi dan Pergudangan	281,8	326,2	313,4	130,6	144,3	141,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124,8	139,1	138,5	91,2	100,7	99,8
J. Informasi dan Komunikasi	212,3	228,1	232,9	194,7	207,5	211,0
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	218,4	221,3	227,8	124,4	126,4	129,2
L. Real Estat	124,9	127,8	128,5	85,0	86,8	87,1
M,N. Jasa Perusahaan	90,7	99,4	102,0	55,4	59,7	60,8
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144,2	164,3	177,7	89,1	101,7	106,0
P. Jasa Pendidikan	132,8	160,3	147,2	82,3	98,5	88,3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,4	69,6	64,7	38,3	46,2	42,8
R,S,T,U. Jasa Lainnya	96,9	107,3	108,2	58,6	63,8	63,8
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	4.837,5	5.072,4	5.063,6	2.825,0	3.002,4	2.980,6
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	234,0	230,1	224,7	136,5	136,7	132,3
Produk Domestik Bruto (PDB)	5.071,5	5.302,5	5.288,3	2.961,5	3.139,1	3.112,9

Sumber BPS Indonesia



b. Tingkat Inflasi

Laju Inflasi diperkirakan akan terjaga stabil dan terkendali dalam rentang sasaran di 2024, namun beberapa risiko tetap perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan inflasi. Tekanan tersebut terutama berasal fluktuasi harga komoditas global akibat tensi geopolitik maupun fenomena El Nino yang masih berlangsung. Pemerintah telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024 untuk inflasi sebesar 2,8%.

Dalam HLM TPIP (High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat)menyepakati tujuh langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Ketujuh langkah strategis dimaksud meliputi Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal, yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; Mengendalikan inflasi kelompok *volatile food* agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang; Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Selanjutnya, Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; Memperkuat sinergi TPIP-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

HLM TPIP juga menyepakati sasaran inflasi tiga tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027 disepakati masing-masing sebesar $2,5\pm 1\%$, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, menjaga daya saing perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Perkembangan inflasi di Indonesia pada bulan Maret 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,13. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 4,78 persen dengan IHK sebesar 106,61 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,42 persen dengan IHK sebesar 103,82. Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,29 persen dengan IHK sebesar 107,82 dan terendah terjadi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 0,88 persen dengan IHK sebesar 103,81.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,62 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,56 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen.

Tabel 3.2
Perkembangan Inflasi Bulan Maret 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2023	IHK Desember 2023	IHK Maret 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Maret 2024 ¹ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Maret 2024 ² (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Maret 2024 ³ (%)	Andil Inflasi m-to-m Maret 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Maret 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	102,99	105,15	106,13	0,52	0,93	3,05	0,52	3,05
Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,50	108,35	111,19	1,42	2,62	7,43	0,41	2,09
Pakaian dan Alas Kaki	101,61	102,19	102,51	0,22	0,31	0,89	0,01	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,66	102,00	102,22	0,02	0,22	0,55	~0	0,09



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,99	102,80	103,04	0,08	0,23	1,03	~0	0,05
Kesehatan	101,41	102,66	103,61	0,21	0,93	2,17	0,01	0,06
Transportasi	108,01	109,81	109,08	0,04	-0,66	0,99	0,01	0,12
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,78	99,75	99,65	-0,02	-0,10	-0,13	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,77	103,05	103,42	0,01	0,36	1,62	~0	0,03
Pendidikan	101,40	102,92	103,12	0,15	0,19	1,70	0,01	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,33	104,06	104,90	0,33	0,81	2,51	0,03	0,25
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,46	105,79	107,14	0,70	1,28	3,56	0,04	0,22

Catatan: ¹Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Februari 2024. ²Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Desember 2023. ³Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Maret 2023.
~0: Data mendekati nol (0)/data dapat diabaikan

Bulan Pada April 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,40. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,04 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,50 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,99 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,08 persen; kelompok transportasi sebesar 1,33 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,58 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,72 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,47 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,31 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Berikut tabel perkembangan inflasi Bulan April 2024. *(sumber BPS Indonesia)*



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Tabel 3.3
Perkembangan Inflasi Bulan April 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2023	IHK Desember 2023	IHK April 2024	Tingkat Inflasi M-to-M April 2024 ¹ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D April 2024 ² (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y April 2024 ³ (%)	Andil Inflasi M-to-M April 2024 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y April 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	103,30	105,15	106,40	0,25	1,19	3,00	0,25	3,00
Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,85	108,35	111,16	-0,03	2,59	7,04	-0,01	1,98
Pakaian dan Alas Kaki	102,29	102,19	102,98	0,46	0,77	0,67	0,02	0,03
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,72	102,00	102,23	0,01	0,23	0,50	~0	0,08
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,19	102,80	103,20	0,16	0,39	0,99	0,01	0,05
Kesehatan	101,57	102,66	103,68	0,07	0,99	2,08	~0	0,06
Transportasi	108,64	109,81	110,09	0,93	0,25	1,33	0,12	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,76	99,75	99,63	-0,02	-0,12	-0,13	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,88	103,05	103,49	0,07	0,43	1,58	~0	0,03
Pendidikan	101,40	102,92	103,14	0,02	0,21	1,72	~0	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,68	104,06	105,22	0,31	1,11	2,47	0,03	0,25
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,07	105,79	108,56	1,33	2,62	4,31	0,08	0,26

Catatan: ¹Persentase perubahan IHK April 2024 terhadap IHK Maret 2024.

²Persentase perubahan IHK April 2024 terhadap IHK Desember 2023.

³Persentase perubahan IHK April 2024 terhadap IHK April 2023.

~0: Data sangat kecil/ mendekati nol

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK Mei 2024 tercatat deflasi sebesar 0,03% (mtm), sehingga secara tahunan menurun menjadi 2,84% (yoy) dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,00% (yoy). Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID)



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Penurunan ini dipengaruhi oleh stabilitas harga pangan dan energi, dua komponen utama yang sering memicu fluktuasi inflasi. Kebijakan subsidi dan kontrol harga yang diterapkan pemerintah tampaknya berhasil menekan kenaikan harga secara keseluruhan.

Inflasi year-on-year ini disebabkan oleh kenaikan harga di sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 6,18 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,10 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,54 persen, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,85 persen. Selain itu, kelompok kesehatan naik 2,06 persen, transportasi 1,34 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya 1,60 persen, pendidikan 1,71 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,51 persen, dan perawatan pribadi serta jasa lainnya naik 4,99 persen, sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami penurunan indeks sebesar 0,16 persen. Berikut laju inflasi Bulan Mei 2024.

Tabel 3.4
Perkembangan Inflasi Bulan MEI 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Desember 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi M-to-M Mei 2024 ¹ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Mei 2024 ² (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Mei 2024 ³ (%)	Andil Inflasi M-to-M Mei 2024 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	103,43	105,15	106,37	-0,03	1,16	2,84	-0,03	2,84
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,39	108,35	110,84	-0,29	2,30	6,18	-0,08	1,75
Pakaian dan Alas Kaki	101,82	102,19	102,94	-0,04	0,73	1,10	~0	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,76	102,00	102,31	0,08	0,30	0,54	0,01	0,09
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,38	102,80	103,25	0,05	0,44	0,85	~0	0,04



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Kesehatan	101,63	102,66	103,72	0,04	1,03	2,06	~0	0,06
Transportasi	108,24	109,81	109,69	-0,36	-0,11	1,34	-0,04	0,17
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,74	99,75	99,58	-0,05	-0,17	-0,16	~0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,96	103,05	103,59	0,10	0,52	1,60	~0	0,03
Pendidikan	101,41	102,92	103,14	~0	0,21	1,71	~0	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,91	104,06	105,49	0,26	1,37	2,51	0,03	0,25
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,30	105,79	109,50	0,87	3,51	4,99	0,05	0,31

Berbagai kebijakan intervensi pasar mampu menahan kenaikan harga pangan lebih jauh, di antaranya melalui pemberian bantuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BLT El Nino, penyaluran beras SPHP, masifnya operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di daerah, dan bantuan biaya logistik melalui fasilitasi distribusi pangan. Optimalisasi intervensi pasar tetap menjadi prioritas untuk dilanjutkan di 2024 guna menjaga stabilitas harga pangan, termasuk bantuan pangan maupun BLT Mitigasi Risiko Pangan sebagai kelanjutan BLT El Nino.

c. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Penentuan nilai tukar merupakan suatu hal penting bagi perekonomian suatu negara karena hal tersebut merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisolasi perekonomian suatu negara dari gejolak perekonomian global. Pada asumsi dasar ekonomi makro APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp.15.000/dolar.

Permasalahan nilai tukar sudah menjadi hal yang sangat penting. Kegiatan pembiayaan ekspor dan impor membutuhkan suatu alat pembayaran yang sah dan berlaku secara internasional, bahkan dapat dikatakan kemampuan dan kondisi perekonomian suatu negara saat ini dapat ditentukan oleh adanya fluktuasi dari nilai tukar tersebut. Selain itu nilai tukar antara mata



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dapat berubah-ubah atau berfluktuasi.

Nilai tukar rupiah mencatatkan pelemahan ke level terendah dalam 4 tahun terakhir atau sejak April 2020 yang mendekati Rp16.000 per dolar AS. Pelemahan ini seiring dengan outflow di pasar obligasi Indonesia, yang tercatat mencapai US\$1,7 miliar pada kuartal pertama tahun ini. Pelemahan rupiah juga banyak dipengaruhi oleh pelemahan yuan China. Kondisi ini juga masih dipengaruhi oleh penguatan dolar AS yang memicu capital outflow atau aliran modal keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). Melemahnya rupiah akan membuat biaya barang semakin mahal dan akan mendorong inflasi serta dapat berdampak pada kebijakan bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Bagi bank, pelemahan rupiah barang tentu akan membawa ancaman peningkatan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) terutama portofolio kredit valuta asing (valas). Kondisi tersebut juga akan menggerus laba.

Sepanjang bulan Juni, Rupiah sempat tertekan hingga 0,70% karena tingginya ketidakpastian pasar global, penguatan Dolar AS, dan ketegangan geopolitik. Namun, secara umum, stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga berkat berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Meski melemah 5,92% sejak akhir Desember 2023, Rupiah masih lebih stabil dibandingkan mata uang lainnya seperti Won Korea, Baht Thailand, Peso Meksiko, Real Brazil, dan Yen Jepang.

Penguatan dolar yang menekan beberapa nilai tukar, termasuk rupiah, akan membawa dampak signifikan pada belanja subsidi pemerintah. Pengeluaran untuk subsidi akan meningkat, terutama untuk komoditas seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah berarti biaya impor barang-barang tersebut menjadi lebih mahal, sehingga beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah juga akan meningkat. Hal ini berpotensi menambah tekanan pada anggaran pemerintah dan memerlukan penyesuaian kebijakan untuk mengelola beban fiskal yang semakin besar.



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah BI itu termasuk peningkatan intervensi di pasar valas serta penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI). BI telah melakukan intervensi dengan menggunakan cadangan devisa yang saat ini posisinya sebesar 139 miliar dolar AS.

Cadangan devisa tersebut dikumpulkan saat terjadi aliran modal yang masuk ke Indonesia (inflow) dan dimanfaatkan ketika keluarnya modal asing dari Indonesia (outflow), dalam rangka menjaga stabilitas rupiah. Lebih lanjut, di bawah koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), BI juga berupaya mempertahankan stabilitas Surat Berharga Negara (SBN) dengan membeli SBN dari pasar sekunder. BI kemudian memanfaatkan instrumen jangka pendek yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik arus masuk valuta asing dan mengurangi arus keluar dengan tujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Langkah lain yang ditempuh Bank Indonesia adalah dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait Devisa Hasil Sumber Daya Alam (DHE SDA). Dari jumlah DHE SDA yang masuk sebesar Rp13 miliar, sebanyak Rp3,9 miliar disalurkan ke BI.

Pada triwulan kedua tahun 2024, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) telah menempuh berbagai kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah. Ada beberapa kebijakan utama yang telah diimplementasikan yaitu Bank Indonesia meningkatkan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

nilai tukar Rupiah. Hal ini dilakukan melalui operasi moneter yang intensif serta penguatan strategi operasi moneter pro-market seperti optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUV.

BI mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dengan menjaga suku bunga acuan pada level yang mendukung stabilitas Rupiah. Hal ini termasuk menjaga yield Surat Berharga Negara (SBN) pada level yang menarik bagi investor asing. Disamping itu juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valuta asing (valas) dari Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023. Ini termasuk pengelolaan devisa hasil ekspor untuk memperkuat cadangan devisa nasional.

Pemerintah terus memonitor dan mengelola aliran modal asing untuk memastikan stabilitas pasar keuangan domestik. Ini termasuk pengawasan dan pengelolaan premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia serta aliran investasi portofolio. Bersama pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam mengendalikan inflasi, yang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas Rupiah. Upaya ini termasuk menjaga inflasi inti dan inflasi harga pangan tetap terkendali.

d. Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun

Pemerintah telah menetapkan Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun untuk asumsi makro tahun anggaran 2024 sebesar 6,7%.

Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Surat berharga negara (SBN) memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung pembangunan negara . Adanya SBN pemerintah tidak hanya bergantung pada pinjaman luar negeri atau penerimaan pajak. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dari ketergantungan pada satu sumber pendanaan.



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

SBN memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat dan institusi keuangan dalam negeri. Dengan adanya instrumen investasi ini, dana yang tersedia di dalam negeri dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. SBN dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan. Dengan menerbitkan atau menarik kembali SBN, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang berdampak pada stabilitas ekonomi.

Penerbitan SBN dapat membantu menutup defisit anggaran pemerintah. Ini memungkinkan pemerintah untuk tetap melanjutkan program-program pembangunan meskipun terdapat kekurangan dana dalam anggaran negara.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan sebanyak delapan seri Surat Berharga Negara (SBN) Ritel tahun 2024. Delapan seri SBN tahun 2024 terdiri dari lima jenis investasi yaitu : Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 dan ORI026, Sukuk Ritel (SR) seri SR020 dan SR021, Sukuk Tabungan (ST) seri ST012 dan ST013, Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013 dan Sukuk Wakaf Ritel (SWR) seri SWR005.

Prospek penerbitan SBN Ritel pada 2024 diprediksi sekitar Rp157,06 triliun atau naik 6,5% secara year-on-year (yoy) dibandingkan realisasi penerbitan SBN ritel sepanjang 2023 sebesar Rp147,42 triliun. Hal itu dikarenakan pemerintah masih memiliki alokasi dana saldo anggaran lebih [SAL] sebesar Rp51,38 triliun pada RAPBN 2024. Permintaan SBN ritel pada 2024 diperkirakan masih cukup baik mengingat SBN ritel merupakan instrumen yang dianggap aman dan menjanjikan return yang cenderung terukur dibandingkan dengan instrumen yang lain.

Faktor yang mempengaruhi penerbitan SBN ritel pada 2024 yakni kebijakan pengelolaan utang negara, dinamika pasar keuangan domestik seperti yield obligasi pemerintah acuan 10 tahun, dan spread yield antara obligasi pemerintah Indonesia dengan US Treasury Yield. Selain itu, lanjutnya, faktor suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan suku bunga Bank Sentral AS Federal Reserve juga memengaruhi penerbitan SBN ritel 2024. Adapun, BI masih menahan suku



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

bunga acuan di level 6%, sedangkan The Fed juga menahan suku bunga acuan di kisaran 5,25%-5,5%.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia Juni 2024 sebesar US\$79,31 per barel atau turun sebesar US\$0,47 per barel dari acuan Mei 2024 di level US\$79,78 per barel. penetapan ICP Juni 2024 tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 327.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Juni 2024 tanggal 1 Juli 2024. Pada APBN 2024 sebagai dasar ekonomi makro pemerintah telah menetapkan ICP sebesar 82 US\$ / barel.

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menerangkan penurunan harga minyak mentah utama internasional antara lain dipengaruhi oleh keraguan pasar terhadap permintaan minyak mentah dunia, yang diindikasikan dengan peningkatan stok minyak AS. Terdapat faktor yang mempengaruhi pasar internasional, antara lain aksi profit-taking saat harga minyak mentah mengalami penguatan yang dipicu oleh kekhawatiran atas gangguan pasokan minyak akibat pergolakan geopolitik di Rusia dan Timur Tengah. Selain itu, kekhawatiran lainnya adalah akan kondisi perekonomian AS saat Bank Sentral AS melakukan penundaan penurunan tingkat suku bunga, sehingga memperkuat nilai tukar Dolar AS dan membuat investor mengalihkan investasi dari pasar komoditas kepada Dolar AS. Serta, kekhawatiran pasar akan peningkatan pasokan minyak mentah, karena hasil pertemuan OPEC+ pada awal Juni 2024, antara lain menyepakati akan mulai mengurangi pemotongan produksi pada awal Q4 2024.

Terkait pasokan minyak dunia bulan Juni 2024, IEA melaporkan peningkatan pasokan minyak dunia sebesar 520 ribu barel per hari menjadi 102,5 juta barel per hari dibandingkan laporan bulan sebelumnya. Di sisi lain, dalam laporannya, IEA menurunkan proyeksi pertumbuhan minyak mentah dunia proyeksi pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia tahun 2024 sebesar 100 ribu bph menjadi 960 ribu bph. Lebih lanjut, faktor lain yang menyebabkan penurunan harga minyak mentah Juni 2024, kata Tim Harga adalah stok minyak



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

mentah Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 4,8 juta per barel menjadi 460,7 juta per barel dibanding stok bulan sebelumnya. Sehingga hal ini membuat pasar khawatir akan permintaan minyak di saat musim panas. Adapun, stok gasoline Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 3,0 juta bbl menjadi 233,9 juta bbl dibanding stok bulan sebelumnya.

Pada awal bulan Juli per tanggal 3 Juli 2024 harga minyak naik sekitar 1% setelah penurunan stok minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan, namun kenaikan tersebut dibatasi oleh kekhawatiran tentang meningkatnya persediaan global dalam perdagangan yang tipis menjelang liburan Hari Kemerdekaan AS. Dalam Analisa Ekspor yang kuat, sedikit penurunan impor, dan pulihnya pengoperasian kilang berkolusi untuk menarik persediaan minyak mentah sebesar 12 juta barel. Potensi gangguan pasokan akibat Badai Beryl juga membuat harga tetap tinggi, meskipun kekhawatiran mereda setelah Pusat Badai Nasional AS mengatakan badai tersebut diperkirakan akan melemah saat memasuki Teluk Meksiko. Dampak hujan dan angin masih dapat mengganggu produksi minyak lepas pantai Meksiko serta infrastruktur ekspornya dan memperketat pasokan.

Produksi OPEC naik untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Juni, berdasarkan survei Reuters pada hari Selasa, yang membebani harga minyak. Pasokan yang lebih tinggi dari Nigeria dan Iran mengimbangi dampak pengurangan pasokan secara sukarela oleh anggota lain dan aliansi OPEC+ yang lebih luas. OPEC+ dilaporkan telah meningkatkan produksi pada bulan Juni meskipun ada janji untuk menjaga kuota hingga kuartal ketiga, dan kekhawatiran yang masih ada mengenai pemulihan yang lambat di China mengirimkan sinyal bearish.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan giant fields jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor. Pada APBN 2024 telah ditetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk lifting minyak dan gas bumi sebesar 1.033 rbsmph.



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi lifting minyak di sepanjang semester I 2024 sebesar 576 ribu barel per hari (BOPD). Jumlah itu masih di bawah target realisasi lifting minyak di APBN 2024 sebesar 635 ribu BOPD, atau setara 91 persen. Pun dari target Work Program and Budget (WP&B) yang disepakati Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar 589,5 ribu BOPD, atau setara 98 persen. Hal tersebut dikarenakan proses pengeboran minyak di paruh pertama tahun ini memang dihadapkan pada kendala banjir di beberapa wilayah, khususnya Blok Rokan. Realisasi salur gas bumi di semester I 2024 juga masih belum capai target. Dengan capaian 5.301 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), baru setara 92 persen dari target APBN dan 97 persen dari target WP&B. Capaian salur gas ini masih terkendala dari sisi infrastruktur. Sehingga diharapkan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I ruas Semarang-Batang bisa tersambung di akhir 2025. Sehingga kelebihan gas dari Jawa Timur bisa dialihkan ke Jawa Barat. Demikian juga pumping yang di Natuna, sehingga kelebihan di Natuna bisa dialihkan, tapi bisa mengalir ke Batam.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan investasi di 2024 mencapai 16 miliar dollar AS atau Rp 261,6 triliun, angka tersebut naik dibandingkan 2023 yaitu sebesar 13,7 dollar AS.

Sejak tahun 2019 pengeboran hanya mencapai 322 sumur, namun pemerintah menargetkan pengeboran mencapai 799 sumur selama 2023 – 2024. Dari sisi suplai, kebutuhan industri terhadap minyak dan gas terus bertambah baik bagi industri lama dan industri baru. Sesuai cita-cita pemerintah adalah Indonesia emas pada tahun 2045 maka sektor industri lifting minyak dan gas bumi adalah salah satu motor penggerak utama yang harus didukung, karena tumbuhnya industri tersebut sangat penting dan kebutuhan akan gas yang sudah dinyatakan meningkat tentu membuat optimis.

Transisi energi akan menempatkan peranan gas lebih strategis dan konsumsi gas kedepannya akan meningkat. Saat ini pemanfaatan gas sangat meluas, mulai dari rumah tangga, bermacam-macam industri hingga transportasi. Untuk itu diharapkan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

pelaku industri midstream dan hilir. Tren meningkatnya produksi gas akan terus berlanjut di masa yang akan datang, sehingga dibutuhkan infrastruktur jaringan gas yang handal dan pasar yang memadai. Seiring meningkatnya produksi gas dimasa yang akan datang, maka infrastruktur gas harus sudah disiapkan, agar ketika proyek hulu migas sudah selesai, maka industri pengguna gas dapat terhubung ke sumber gas di hulu.

Pemerintah mendorong agar pemanfaatan gas di domestik diprioritaskan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian, membangun ketahanan energi dan juga ketahanan pangan. Misalnya, gas untuk industri pupuk. data Kementerian ESDM, terkait pemanfaatan gas di industri pupuk, kecukupan pasokan gas bagi industri pupuk memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan menjadi sektor industri yang menggunakan input gas bumi paling besar (58,48 persen) di dalam biaya produksinya.

Berdasarkan data Rystad Energy, diperkirakan Indonesia memiliki sumber daya gas lebih dari 100 trillion cubic feet (TCF). Volume ini mewakili hampir separuh dari total sumber daya gas di Asia Tenggara. Namun, potensi sumberdaya yang besar saja tidak cukup karena tantangan sebenarnya adalah bagaimana monetisasi sumberdaya dapat segera dilakukan. untuk mengoptimalkan cadangan gas Indonesia, khususnya bagi KKKS, memiliki tantangan yang kompleks. Sebagian besar potensi gas belum diproduksi lantaran berada di wilayah deepwater serta memiliki kandungan CO2 tinggi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menciptakan kebijakan yang tepat demi mengantisipasi kebutuhan energi di masa depan, sekaligus memenuhi kebutuhan saat ini, khususnya dalam rangka menghadirkan energi rendah karbon. Strategi untuk memaksimalkan cadangan ini harus bertahap. Dalam jangka pendek, kita perlu fokus untuk menjalankan kembali proyek?proyek gas yang tertunda karena tantangan pada Mergers and Acquisition(M&A) dan keterbatasan keuangan.

Jangka menengah, lanjut Sofwan, pengembangan Blok Masela dan IDD menjadi sangat penting. Namun, masalah harga gas juga jadi salah satu faktor penentu kesuksesan pengembangan kedua blok tersebut. Tantangan berikutnya



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

adalah penyesuaian dengan kebijakan low-carbon dan meningkatkan daya tarik fiskal proyek-proyek ini serta tidak lupa juga ketersediaan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur dan hub penting untuk mengeksploitasi penemuan pada deepwater. Selain itu, penyesuaian kebijakan penetapan harga gas domestik dan memastikan peningkatan demand gas yang stabil juga sangat penting. Sejalan dengan itu, harus memberikan prioritas untuk lebih mempromosikan potensi eksplorasi di Indonesia pada perusahaan migas internasional. Insentif diperlukan untuk bisa memastikan keekonomian proyek migas ke depan. Memasukkan insentif dengan basis waktu akan berdampak signifikan pada realisasi proyek.

Kehadiran teknologi baru dalam sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan gas bumi di Indonesia juga dinilai sangat penting. Partisipasi perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki keahlian dalam bidang Enhanced Oil Recovery (EOR), Carbon Capture and Storage (CCS), dan teknologi di area deepwater sangat diperlukan.

Pengembangan proyek gas bumi yang sukses, sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan memastikan pasokan stabil untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Dalam konteks ketegangan politik global saat ini, produksi gas domestik yang dimiliki Indonesia juga menjadi hal sangat penting. Indonesia sebaiknya tidak melewatkan peluang untuk menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar transisi dan untuk mengembangkan CCS hub.

Untuk mendukung Tema kebijakan fiskal tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, digunakan strategi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah Panjang. Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi structural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024 adalah sebagai berikut :



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%
- Inflasi sebesar 2,8%
- Tingkat Bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,7%
- Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp.15.000 / US\$
- Harga Minyak Mentah 82US\$ / barel
- Lifting Minyak 635 rpbh
- Lifting Gas 1.033 rbsmph

Sedangkan target pembangunan 2024 adalah sebagai berikut :

- Tingkat Pengangguran 5,0% – 5,7 %
- Indeks Pembangunan Manusia 73,99 – 74,02
- Tingkat Kemiskinan 6,5% – 7,5%
- Gini Ratio 0,374 – 0,377
- Kemiskinan Ekstrim 0% - 1%
- Nilai Tukar Petani 105 – 108
- Nilai Tukar Nelayan 107 – 110

Untuk postur APBN yang telah di undangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,3 triliun yang bersumber dari perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, PNBPNP Rp492 triliun dan hibah sebesar Rp0,4 triliun
- Belanja Negara sebesar Rp3.325,1 triliun yang dianggarkan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun
- Pembiayaan Anggaran sebesar Rp522,8 triliun yang terdiri dari pembiayaan utang Rp648,1 triliun dan pembiayaan investasi sebesar Rp(176,2) triliun.
(sumber:informasi APBN 2024)



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Berikut asumsi dasar makro APBN Tahun 2024 yang telah disepakati Pemerintah.

Tabel 3.5
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2024

No.	INDIKATOR EKONOMI	2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2%
2	Inflasi (%)	2,8%
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	15.000
4	Surat Berharga Negara 10 tahun	6,7%
5	ICP (US\$/barell)	82 US\$
6	Lifting minyak bumi (ribu bph)	635
7	Lifting gas bumi (ribu bsmph)	1.033

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Pemerintah Kabupaten Tapin dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 memperhatikan beberapa asumsi dalam melaksanakan program-program pembangunan. Berikut asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Tabel 3.6
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBD Tahun 2024

ASUMSI MAKRO	PERUBAHAN TA 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,00
Tingkat Kemiskinan	3,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85
Sektor Ekonomi Dominan	a. Pertambangan dan Penggalian (42,89 %) b. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,35%) c. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,70%)
Sektor dengan pertumbuhan tertinggi	a. Pengadaan Listrik dan Gas (8,35%) b. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,06%) c. Jasa keuangan dan asuransi (3,55%)
Total PDRB (Rp juta)	13.485.375
PDRB/Kapita (Rp juta)	67



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf C poin 1 bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, telah disusun target Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional serta dengan melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya.

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 sampai akhir tahun diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp673.065.503.964,00 yang semula ditargetkan sebesar Rp2.139.375.625.965,00 menjadi 2.812.441.129.929,00 atau mengalami kenaikan sebesar 31,46 %.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut gambaran perubahan asumsi pendapatan daerah yang terletak pada potensi pendapatan daerah pada tahun 2024. Komponen-komponen pendapatan tersebut meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai akhir tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp101.407.872.611,00 apabila dibandingkan dengan target awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Tahun 2024 sebesar



PERUBAHAN KUA T.A 2024 BKAD KABUPATEN TAPIN

Rp105.286.910.000,00 yang berarti terjadi penurunan sebesar Rp4.874.662.487 atau mengalami penurunan sebesar 5 %.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah.

Jumlah pendapatan transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ini mengalami kenaikan sebesar Rp556.625.442.172,00 yang semula sebesar Rp1.641.704.762.457,00 menjadi Rp2.198.330.204.629 atau naik sebesar 33,91 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2024 sampai dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp120.319.099.181,00 yang semula sebesar Rp392.383.953.508,00 menjadi sebesar Rp512.703.052.689,00 atau mengalami kenaikan sebesar 30,66 %.



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Perbandingan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.139.375.625.965	2.812.441.129.929	673.065.503.964
4.1	Pendapatan Asli Daerah	105.286.910.000	101.407.872.611	(3.879.037.389)
4.2	Pendapatan Transfer	1.641.704.762.457	2.198.330.204.629	556.625.442.172
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	392.383.953.508	512.703.052.689	120.319.099.181

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp107.810.047.676,00 yang semula sebesar Rp2.630.464.977.896,00 menjadi sebesar Rp2.738.275.025.572,00 atau naik sebesar 4,10%.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terjadi pada Belanja Operasi. Dimana Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp132.734.348.600,00 yang semula sebesar Rp1.571.969.223.190,00 menjadi sebesar Rp1.704.703.571.790,00 atau naik sebesar 8,44 %.

Belanja Modal dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp65.179.238.922,00 dari semula sebesar Rp806.774.244.306,00 menjadi sebesar Rp741.595.005.384,00 atau mengalami penurunan sebesar 8,08 %.

Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000.000,00 dari semula Rp25.000.000.000,00 menjadi Rp15.000.000.000,00 atau turun sebesar 40,00%.



PERUBAHAN KUA T.A 2024

BKAD KABUPATEN TAPIN

Belanja Transfer dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp50.254.937.998 dari semula Rp226.721.510.400,00 menjadi sebesar Rp276.976.448.398,00 atau bertambah sebesar 22,17 %.

Perbandingan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
PERBANDINGAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5=4-3
5	BELANJA	2.630.464.977.896	2.738.275.025.572	107.810.047.676
5.1	Belanja Operasi	1.571.969.223.190	1.704.703.571.790	132.734.348.600
5.2	Belanja Modal	806.774.244.306	741.595.005.384	(65.179.238.922)
5.3	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	15.000.000.000	(10.000.000.000)
5.4	Belanja Transfer	226.721.510.400	276.976.448.398	50.254.937.998

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp565.255.456.288,00 yang semula sebesar Rp491.089.351.931,00 menjadi sebesar Rp74.166.104.357,00 atau dengan persentase sebesar 115,10%.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp576.419.669.788,00 yang semula sebesar Rp581.128.307.019,00 menjadi sebesar Rp4.708.637.231,00 atau sebesar 99,19%

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak terjadi perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.500.000.000,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.164.213.500,00 dari pagu semula sebesar Rp90.038.955.088,00 menjadi sebesar Rp78.874.741.588 atau sebesar 12,40 %.

Perubahan tersebut dikarenakan terjadinya penurunan pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp11.164.213.500,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp73.538.955.088,00 menjadi sebesar Rp62.374.741.588,00 atau dengan persentase penurunan sebesar 15,18%.

Perbandingan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
PERBANDINGAN PEMBIAYAAN DAERAH KAB. TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
6	Pembiayaan Netto	491.089.351.931	74.166.104.357	(565.255.456.288)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	581.128.307.019	4.708.637.231	(576.419.669.788)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.038.955.088	78.874.741.588	(11.164.213.500)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan berbagai upaya kebijakan dan strategi dalam menjalankan program program pembangunan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja, baik rencana kerja jangka panjang, menengah ataupun rencana kerja tahunan. Berikut strategi pencapaian pendapatan daerah yaitu :

- Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
- Mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah dalam Upaya percepatan penerimaan Pendapatan Daerah;
- Mengoptimalkan Pengendalian , Pengawasan , dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- Menjalin Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan;
- Memperbanyak jenis – jenis kanal pembayaran digital;
- Pemasangan Alat Perekam Transaksi;
- Kegiatan Rekonsiliasi dengan SKPD pemungut Retribusi dalam rangka koordinasi terkait masalah- masalah retribusi;
- Kegiatan Rekonsiliasi PNBPN dengan Kementerian ESDM dan DJPK untuk mendapatkan informasi dalam rangka menentukan Target dan Proyeksi DBH Minerba;
- Kegiatan Rekonsiliasi dengan BKAD dan Bapenda Propinsi untuk mendapatkan informasi dalam rangka menentukan Target dan Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dibahas dan disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapin dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

Rantau, Juli 2024

Pimpinan DPRD

H. YAMANI

BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN